

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst.

C. Buku

Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

Ali, Achmad, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Gunung Agung, Jakarta.

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Diana, Napitupulu, 2010, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Efendi, Junaidi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Fuady, M., 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul.
- Hadjon, P.M, dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamdan, M., 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, E., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, E. O., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, J. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indroharto, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, 1986, *Ilmu Negara Umum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P. A. F., 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lotulung, Paulus Efendi, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Manan, B., 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung.
- Manan, B., 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UI Press, Jakarta

- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, SF, 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2013, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana: Pidato diucapkan pada Upatjara Peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mustafa, Bachsan, 2016, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurdjana, IGM., 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Total Media, Yogyakarta.
- Qardhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung.
- Setiade, Elly dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Damsar, Jakarta.
- Sinamo, Nomesen, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, S., 1997, *Hak Menguji Materil di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Sudrajat, T., 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sumaryanto, A.D., 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suseno, F.M., 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Sutopo, H.B., 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Gasindo, Surakarta.
- Thalib, A.R., 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tirtaamidjaja, M. H., 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta
- Utrecht, E., 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Waluyo, B., 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winanmo, N.B., 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

D. Jurnal

- Al Hafis, Raden Imam dan Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", *PUBLIKA, Volume 3 Nomor 1* (2017).
- Alkostar, Artidjo. "Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXIV No. 281* (April 2009).
- Dina, Khairunnisa Bella dan Hamnah Hasanah. "Analisis PermenKP No.12/2020 terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 1* (2020).
- Hessick, Carissa Byrne. "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?" *Boston University Law Review, Vol. 88:1109* (2008).
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al'Adl, Volume IX Nomor 3* (Desember 2017).

Juliani, Henny. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara". *Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 4* (Juni 2019).

Manopo, Berlian. "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional". *Les Crimen Volume X Nomor 5* (April 2021).

Peonasu, Cosmin. "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment," *Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1/2015* (2015).

Suryanto, Ahmad F Budi. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia," *Jurnal Dharmasisya, Vol. 1, Article. 4.* (Juni 2021).

E. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi n.d., Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 5 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

KIARA n.d., Pasca Vonis Mahkamah Agung Kepada Edhy Prabowo, KIARA: Alasan Mahkamah Agung Bertolak Belakang dengan Fakta Korupsi Edhy!, diakses pada 13 Mei 2023, <https://www.kiara.or.id/2022/03/10/pasca-vonis-mahkamah-agung-kepada-edhy-prabowo-kiara-alasan-mahkamah-agung-bertolak-belakang-dengan-fakta-korupsi-edhy/?mbstx=isywy>.

KIARA n.d., 14 Perusahaan Ekspor Benih Lobster Salahi Aturan, KIARA: Masalah Utamanya adalah Permen KP 12 Tahun 2020, diakses pada 13 Mei 2023, <https://www.kiara.or.id/2020/09/25/14-perusahaan-ekspor-benih-lobster-salahi-aturan-kiara-masalah-utamanya-adalah-permen-kp-12-tahun-2020/>.

F. Peraturan Perundang-undangan Negara Lain

Criminal Code of Republic Romania